

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis pengungsi di perbatasan Belarus-Uni Eropa pada tahun 2021 menandai peningkatan signifikan dalam ketegangan yang sedang berlangsung antara Belarus dan Uni Eropa. Presiden Belarus Aleksandr Lukashenko, yang menghadapi tekanan internasional yang meningkat setelah pemilihan presiden 2020 yang kontroversial dan sanksi berikutnya dari Uni Eropa, mengatur kebijakan dengan mempermudah dan memfasilitasi pergerakan migran ke perbatasan Polandia, Lithuania, dan Latvia (Kuźelewska & Piekutowska, 2023). Krisis ini tidak hanya menyoroti penderitaan kemanusiaan ribuan pengungsi tetapi juga menggarisbawahi dinamika politik yang kompleks antara Belarus dan UE. Krisis yang merupakan buntut dari kebijakan yang dibuat oleh Lukashenko ini adalah respon terhadap tekanan yang dialaminya pasca kerusuhan yang terjadi di dalam negeri Belarus. Situasi tersebut mengungkapkan strategi politik Lukashenko dalam cakupan yang lebih luas, di mana keyakinannya yang kuat tentang kedaulatan, otonomi nasional, dan peran Belarus dalam komunitas internasional memainkan peran penting dalam membentuk keputusannya (Astapenia & Matsukevich, 2022).

Inti dari kepemimpinan Lukashenko adalah keyakinannya bahwa Belarus harus mempertahankan kendali penuh atas urusan dalam dan luar negerinya, bebas dari campur tangan eksternal. Keyakinan akan kedaulatan ini telah menjadi ciri khas rezimnya, khususnya dalam menghadapi kekuatan Barat seperti Uni Eropa. Bagi Lukashenko, UE merupakan blok yang berusaha memaksakan nilai-nilainya

pada negara-negara tetangga, yang sering kali mengorbankan kedaulatan (Acikovsky & Yuriev, 2021). Dengan demikian, sikap konfrontatifnya terhadap UE bukan sekadar respons terhadap ketegangan diplomatik, tetapi juga penegasan kemerdekaan Belarus dan perlawanan terhadap tekanan asing. Selama krisis pengungsi, tindakan Lukashenko mencerminkan pandangan dunia ini saat ia berusaha memanfaatkan situasi untuk tidak hanya membalas sanksi UE tetapi juga untuk menantang pengaruh UE di Eropa Timur.

Krisis pengungsi di perbatasan Belarusia-Uni Eropa pada tahun 2021 dengan cepat meningkat menjadi bencana kemanusiaan karena ribuan migran, terutama dari Timur Tengah dan Afrika, diarahkan ke Belarusia dengan janji untuk bantuan menyeberang ke Uni Eropa (Bharti, Pathak, & Mathur, 2023). Banyak dari para migran ini, yang melarikan diri dari perang, kesulitan ekonomi, dan penganiayaan, mendapati diri mereka terdampar dalam kondisi yang keras di perbatasan, mengalami suhu beku, kekurangan makanan, dan akses terbatas ke perawatan medis. Uni Eropa merespon dengan meningkatkan keamanan perbatasan dan upaya untuk mencegah para migran menyeberang ke Polandia, Lithuania, dan Latvia, yang menyebabkan bentrokan antara migran dan pasukan perbatasan dan semakin memperparah krisis (Tomczak-Boczko, Gołębiowska, & Górny, 2023).

Situasi ini menuai kecaman internasional yang meluas, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi hak asasi manusia yang menyerukan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Meskipun krisis semakin parah, pemerintah Belarus terus memfasilitasi pergerakan migran ke perbatasan (UNHCR, 2021). Ini

bukanlah tindakan kebetulan, melainkan hasil dari keputusan kebijakan yang disengaja. Pada Agustus 2021, pemerintah Belarusia melonggarkan persyaratan visa bagi warga negara seperti Irak, Suriah, dan Afghanistan, sehingga memudahkan para migran untuk memasuki Belarusia (Kuźelewska & Piekutowska, 2023). Selain itu, Lukashenko membuat pernyataan publik, termasuk pada September 2021, di mana ia secara terbuka menyatakan bahwa Belarus tidak akan mencegah para migran menyeberang ke Uni Eropa, yang pada dasarnya mendorong pergerakan menuju perbatasan. Dalam sebuah wawancara dengan BBC, Lukashenko menyatakan, *“I told the EU I’m not going to detain migrants on the border, hold them at the border, and if they keep coming from now on I still won’t stop them. Because they’re not coming to my country, they’re going to yours.”* Pernyataan ini, bersamaan dengan fasilitasi resmi pemerintah terhadap perjalanan migran, membingkai krisis ini sebagai bagian dari strategi geopolitik Belarusia yang lebih luas untuk membalas sanksi Uni Eropa dan kebijakan luar negerinya (BBC News, 2021).

Krisis ini tidak hanya menguji keamanan perbatasan dan sistem suaka Uni Eropa, tetapi juga menyoroti ketegangan geopolitik yang meningkat di Eropa Timur, karena Belarus diklaim oleh Barat, menggunakan penderitaan para migran sebagai alat perang hibrida untuk melawan Uni Eropa. Situasi ini meninggalkan bekas yang mendalam bagi komunitas internasional, menimbulkan pertanyaan tentang etika menggunakan orang-orang yang rentan sebagai pion dalam konflik politik (Council of the European Union, 2023).

Hubungan politik antara Belarus dan Uni Eropa telah lama diliputi ketegangan, khususnya setelah pemilihan presiden 2020, yang secara luas dianggap tidak bebas maupun adil. Menanggapi terpilihnya kembali Lukashenko, yang dirusak oleh klaim kecurangan pemilu dan penindasan protes yang disertai kekerasan, UE memberlakukan sanksi ekonomi yang menargetkan sektor-sektor utama ekonomi Belarus dan pejabat senior, termasuk Lukashenko sendiri (Council of the European Union, 2023). Akibatnya, Lukashenko mendapati dirinya semakin bergantung pada Rusia untuk dukungan politik dan ekonomi, yang semakin memperburuk hubungan dengan UE (Kascian & Denisenko, 2021).

Namun Lukashenko tidak menjadi pesimis dan berusaha melakukan pembaharuan arah kebijakan luar negerinya. Lukashenko menekankan kepada anggota Kementerian Luar Negeri Belarus “*The ministry must keep in mind that the modern world is not limited to the countries of the European Union. It is much bigger*,” yang maknanya, Lukashenko tidak akan berusaha membangun hubungan dengan Uni Eropa, dan lebih memilih negara-negara lain untuk membuka kesempatan baik bagi Belarus (Press Service of the President of the Republic of Belarus, 2021). Lukashenko dengan demikian memilih mengambil respon yang dingin dan krisis pengungsi ini secara strategis digunakan oleh Lukashenko sebagai alat untuk melemahkan pengaruh UE dan menantang kebijakannya terhadap Belarus, dengan membingkainya sebagai reaksi terhadap campur tangan Barat.

Dalam menganalisis krisis pengungsi di perbatasan Belarusia-Uni Eropa yang dimulai pada 2021 lalu, terlihat jelas bahwa tindakan pemerintah Belarusia

bukan hanya merupakan respon atas dasar tekanan hukum dan perjanjian internasional atau birokratis, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kepribadian dan gaya kepemimpinan Presiden Aleksandr Lukashenko. Sebagai salah satu pemimpin terlama di Eropa, Lukashenko telah mempertahankan cengkeraman otoriter terhadap kekuasaan sejak 1994, membentuk kebijakan domestik dan luar negeri Belarusia melalui pendekatan yang sangat personal terhadap pemerintahan. Keputusannya untuk menggunakan migrasi sebagai alat pengaruh geopolitik tidak hanya mencerminkan perhitungan strategis, tetapi juga keyakinan, motif, dan sifat kepemimpinan yang mengakar kuat (Parker, 2011).

Manae, Natalie, dan Dzmitry, (2011) dalam jurnal mereka yang berjudul *"More State than Nation: Lukashenko's Belarus"* secara khusus menyorot bagaimana Belarusia merupakan negara pecahan Uni Soviet yang paling mempertahankan karakteristik dan warisan Soviet dibandingkan negara-negara pecahan Soviet lainnya. Jurnal ini secara terang-terangan mengkritik pemerintahan Lukashenko yang gagal membangun identitas nasional Belarusia yang seharusnya unik dan inklusif seperti eks-Soviet yang lain, tetapi justru membentuk Belarusia menjadi negara dengan nilai dan sistem yang paling mencerminkan nilai neo-Soviet dalam pemerintahannya.

Aleksandr Lukashenko, Presiden Belarusia, sering digambarkan sebagai pemimpin yang mencolok karena pendekatannya yang unik terhadap pemerintahan dan kecenderungannya untuk menentang norma-norma konvensional (Rontoyanni & Korosteleva, 2005). Pendekatannya dianggap unik sebab terdapat perbedaan

yang signifikan dengan pendekatan yang diinginkan oleh Uni Eropa sebagai salah satu aktor yang secara proaktif mempromosikan demokrasi. Lukashenko, melalui kebijakannya dan pendekatannya dalam menjalankan negara pada kenyataannya secara konsisten menolak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, ini ditunjukkan dengan rendahnya skor yang dimiliki Belarusia di Freedom House¹ (Freedom House, 2023).

Meskipun banyak penelitian telah meneliti dimensi politik, ekonomi, dan kemanusiaan dari krisis pengungsi di perbatasan Belarusia-Uni Eropa, terdapat kesenjangan yang nyata dalam penelitian yang mengeksplorasi krisis tersebut melalui lensa analisis kepribadian kepemimpinan. Literatur yang ada sebagian besar berfokus pada strategi geopolitik, kebijakan migrasi, atau konsekuensi kemanusiaan, dan masih sedikit yang membahas peran psikologi individu dan gaya pengambilan keputusan Lukashenko dalam membentuk jalannya peristiwa di sekitar Belarus. Kesenjangan ini memberikan kesempatan menarik untuk menerapkan Teori Idiosinkratik Margaret Hermann, yang menekankan pentingnya kepercayaan, motif, gaya keputusan, dan gaya interpersonal dalam memahami perilaku seorang pemimpin. Memahami sifat-sifat psikologis dan kepemimpinan ini sangat penting untuk menguraikan mengapa krisis pengungsi terjadi seperti yang terjadi dan bagaimana krisis ini bertahan meskipun ada tekanan internasional

¹ Freedom House merupakan sebuah organisasi non-profit yang mempromosikan demokrasi dan menyusun indeks demokrasi yang juga secara reguler melakukan penilaian tingkat kebebasan, demokrasi di negara-negara di dunia.

(Hermann M. G., *Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders*, 1980).

Dengan mengadopsi perspektif personal individu, penelitian ini menawarkan kontribusi unik pada wacana tentang krisis pengungsi Belarusia-Uni Eropa. Penelitian ini berusaha untuk bergerak melampaui analisis tingkat negara konvensional dan menyelidiki faktor-faktor individu yang mendorong keputusan Lukashenko, menawarkan wawasan baru ke dalam hubungan antara kepribadian kepemimpinan dan hasil kebijakan luar negeri (Hermann, Preston, Korany, & Shaw, Summer 2001).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mencari alasan penyebab permasalahan di perbatasan antara Belarus dengan Uni Eropa tersebut terjadi, maka penulis menarik sebuah rumusan masalah, *“mengapa Presiden Aleksandr Lukashenko mengambil kebijakan yang membuat krisis pengungsi terjadi di perbatasan antara Belarusia dengan Uni Eropa?”*

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu tujuan secara umum dan tujuan secara khusus, yakni sebagai berikut:

1.3.1. Tujuan Umum

Tulisan ini memiliki tujuan umum untuk mendapatkan pemahaman baru terkait bagaimana karakteristik unik individu mempengaruhi sebuah pengambilan

keputusan eksekutif dalam lingkup kebijakan luar negeri memiliki pengaruh dalam mengubah pola interaksi antar-aktor internasional. Melalui penelitian ini, penulis bertujuan untuk menganalisis faktor idiosinkratik Lukashenko dalam kebijakan luar negerinya yang mempertahankan Belarusia dan Uni Eropa ke dalam hubungan yang kurang harmonis melalui krisis pengungsi di perbatasan mereka.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menjelaskan secara ilmiah alasan pemimpin Belarusia yang menjadi objek penelitian ini, yakni Presiden Aleksandr Lukashenko mengambil kebijakan yang menciptakan krisis pengungsi di perbatasan Belarusia dengan Uni Eropa. Tulisan ini berusaha memahami dan melihat dari sudut pandang psikologi politik seorang Presiden Aleksandr Lukashenko dalam membentuk lanskap hubungan Belarusia dengan Uni Eropa melalui kebijakan luar negerinya dalam hal ini terkait krisis pengungsi yang dimulai di tahun 2021. Jika kita dapat memahami cara pengambilan keputusan, kita dapat lebih mudah memahami dan, mungkin dapat memprediksi kemungkinan yang terjadi dalam lingkup internasional (Mintz & Jr, 2010). Dengan demikian, tulisan ini akan memberikan wawasan dan referensi dalam mengambil langkah bagi pihak-pihak yang ingin atau sedang menjalin hubungan dengan Lukashenko, sebab tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kekhasan karakter seorang Presiden Lukashenko yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian yang dibagi menjadi dua, manfaat penelitian juga demikian. Berikut dijelaskan manfaat penelitian ini secara akademis dan praktis.

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi penjelasan yang ilmiah mengenai implikasi idiosinkratik dalam membentuk hubungan antar aktor dalam hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi kepentingan akademik karena akan memberikan sumbangsih baik dari segi kuantitas maupun kualitas bagi kemajuan disiplin hubungan internasional. Yakni dengan menambah tulisan yang sesuai dengan kaidah-kaidah keilmiahan dengan menggunakan pendekatan unik idiosinkratik dimana ilmu politik dengan ilmu psikologi dikombinasikan untuk menghasilkan sebuah tulisan yang HI, yakni menganalisis sisi psikologis suatu pemimpin negara yang mempengaruhi arah kebijakan luar negerinya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi bagi kepentingan praktis yakni sebagai karya ilmiah yang disumbangkan oleh akademisi HI untuk dijadikan referensi bagi masyarakat dan juga para pejabat pemerintahan dalam menentukan tindakan atau kebijakan ketika dihadapkan dengan seorang Presiden Aleksandr Lukashenko.

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Kajian Literatur

Dalam mengerjakan penelitian sangat krusial untuk memperhatikan penelitian-penelitian terdahulu untuk menghindari pengerjaan berulang dan plagiarisme. Selain itu, penelitian selalu menuntut adanya kebaharuan yang nantinya akan mendorong kemajuan ilmiah dan berkontribusi pada kemajuan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan riset mengenai penelitian terdahulu, menemukan kekurangan, atau kesenjangan yang belum ditutup. Hal ini akan menghasilkan pembaharuan dan bahkan inovasi yang inovatif dapat memunculkan perspektif baru yang belum pernah dieksplorasi sebelumnya.

Sudah banyak tulisan ilmiah yang membahas terkait dengan hubungan Belarusia dengan Uni Eropa yang buruk dan keruh dan fenomena sosial-politik yang berkembang karena hubungan yang kurang harmonis tersebut. Salah satunya adalah krisis pengungsi yang terjadi di perbatasan antara Belarus dan Uni Eropa yang dimulai di tahun 2021. Para peneliti terdahulu mencoba mengupas isu ini dengan pendekatan dan fokus pembahasan yang beragam pula. Penulis menemukan beberapa tulisan ilmiah yang dijadikan sebagai sumber inspirasi untuk menemukan ide baru dan mengangkat studi kasus terkait krisis pengungsi di antara Uni Eropa dengan Belarusia dari sudut pandang yang berbeda. Berikut adalah tulisan-tulisan dari penelitian sebelumnya yang turut membahas studi kasus yang sama.

Yang pertama adalah, sebuah jurnal yang berjudul “*Belarusian – Polish Border: The Diplomacy of Cross-Border Migration*” yang ditulis oleh M. Bharti,

Shreesh Kumar Pathak dan Aakriti Mathur (2023). Jurnal ini meneliti krisis migran tahun 2021 di perbatasan Belarusia-Polandia, menganalisisnya sebagai masalah kemanusiaan yang bermotif politik dalam konteks yang lebih luas dari hubungan Uni Eropa (UE) dan Belarusia. Para penulis berpendapat bahwa Belarus, di bawah Presiden Aleksandr Lukashenko, dengan sengaja memfasilitasi pergerakan migran Timur Tengah ke perbatasan timur Uni Eropa sebagai bentuk pembalasan terhadap sanksi dan kebijakan Uni Eropa. Taktik ini, yang sering disebut sebagai “*weaponized migration*”, bertujuan untuk mengacaukan Uni Eropa dengan menciptakan perpecahan internal dan menguji kemampuan manajemen krisisnya.

Artikel ini menantang kategorisasi keamanan perbatasan yang disederhanakan dengan menggunakan kerangka teori yang berorientasi sosial dan realis klasik. Menurut artikel tersebut, perbatasan yang aman membutuhkan pemahaman yang berbeda dari paradigma keamanan konvensional karena faktanya sangat kompleks. Para penulis mencatat bahwa para pemimpin Uni Eropa dan Komisi Eropa menuduh Lukashenko dengan sengaja membantu penyelundupan migran ke perbatasan Polandia-Belarusia. Ini menunjukkan peran Uni Eropa dalam menangani krisis tersebut. Penelitian ini menekankan bahwa intervensi dan diplomasi internasional yang komprehensif diperlukan untuk menyelesaikan krisis semacam itu, dan menekankan bahwa, di luar penegakan perbatasan, upaya kolaboratif diperlukan untuk menangani masalah kemanusiaan yang bermotif politik. Artikel ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana migrasi dapat digunakan sebagai alat strategi politik, yang berdampak pada

keamanan manusia dan hubungan internasional, dengan menganalisis bagaimana konflik politik dan migrasi berinteraksi satu sama lain.

Lalu kajian yang kedua merupakan sebuah jurnal yang berjudul “*Who is a ‘true refugee’? Polish political discourse in 2021–2022*” oleh Justyna Tomczak-Boczko, Klaudia Gołębiowska, dan Maciej Górny (2023). Artikel ini mengeksplorasi narasi yang saling bertentangan seputar pengungsi di Polandia selama krisis migrasi yang signifikan, khususnya berfokus pada masuknya pengungsi Ukraina setelah invasi Rusia ke Ukraina. Para penulis menyoroti perbedaan perlakuan yang mencolok antara migran Ukraina, yang sebagian besar disambut dan dibingkai sebagai “*pengungsi sejati*,” dan kelompok-kelompok sebelumnya seperti migran dari Timur Tengah, yang menghadapi hambatan signifikan dan retorika negatif. Perbedaan ini disebabkan oleh instrumentalisasi politik, di mana penerimaan pengungsi Ukraina berfungsi untuk memperkuat identitas dan solidaritas nasional melawan musuh bersama, sementara migran dari Timur Tengah dan Afrika sering digambarkan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan integritas budaya.

Analisis tersebut selanjutnya mengungkap bagaimana sentimen publik telah bergeser ke arah yang positif terhadap pengungsi Ukraina karena adanya kesamaan budaya dan ikatan sejarah yang dirasakan, sangat kontras dengan kecurigaan yang diarahkan kepada para migran non-Eropa. Pendekatan selektif ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang definisi “*pengungsi sejati*” dalam masyarakat Polandia dan menyoroti ketegangan antara kewajiban kemanusiaan dan kepentingan

nasional. Pada akhirnya, artikel tersebut menyerukan penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan yang lebih konsisten di seluruh kelompok migran, dengan mengadvokasi kebijakan yang mencerminkan belas kasih dan solidaritas daripada pembedaan sewenang-wenang berdasarkan asal usul.

Kajian literatur yang selanjutnya adalah “*Multilevel Analysis of the 2021 Poland-Belarus Border Crisis in the Context of Hybrid Threats*” yang ditulis oleh Ondřej Filipec (2022). Di tengah konflik politik antara Uni Eropa (UE) dan Belarusia, ribuan migran Timur Tengah terdampar di perbatasan Belarusia-Polandia. Artikel ini menganalisis bentrokan perbatasan dan politik berbagai isu migrasi di Uni Eropa. Keadaan telah banyak berubah sejak November 2021, dengan masuknya migran yang mencoba melintasi perbatasan Belarusia ke Polandia. Artikel ini lebih lanjut mengartikulasikan peran UE dalam menyelesaikan imigrasi lintas batas ke perbatasan Polandia.

Penelitian ini menganalisis untuk memahami krisis kemanusiaan bermotif politik yang dipahami secara luas sebagai respons dari Belarus. Walaupun teori-teori realis klasik digunakan untuk menjelaskan mekanisme permasalahan lintas batas yang aman, teori-teori yang berorientasi sosial sering kali digunakan untuk mencirikan perbatasan yang lebih longgar. Artikel ini bertujuan untuk menantang kategorisasi dan teori yang disederhanakan ini, yang menyatakan bahwa keamanan perbatasan adalah sebuah realitas yang sudah ada sejak lama dan bahwa keamanan adalah sebuah konseptualisasi teoretis yang lebih kompleks. Penelitian tersebut menggambarkan intervensi internasional dalam krisis imigran di perbatasan

Polandia dan bahwa Komisi Eropa dan para pemimpin Uni Eropa menuduh Lukashenko sengaja membantu penyelundupan migran dari Timur Tengah ke perbatasan Polandia-Belarusia (Filipec, 2022).

Penulis juga menyertakan sebuah literatur makalah yang berjudul "*The Degradation of Belarusian Foreign Policy*" Oleh P. Matsukevich dan Ryhor Astapenia (2022) sebagai sebuah referensi yang menarik. Inti pembahasan dari makalah ini adalah mengenai perubahan arah kebijakan luar negeri Belarusia secara fundamental, yang kemudian mendorong semakin eratnya hubungan Minsk dengan Moscow. Sementara di sisi lain, mengakibatkan memburuknya hubungan Belarusia dengan tetangganya yang lain, yakni Uni Eropa. Makalah ini lebih berfokus pada perubahan kebijakannya dibandingkan kondisi hubungan Belarusia dengan Uni Eropa. Terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Belarusia sebab kekacauan dalam domestiknya yang diakibatkan oleh rusaknya stagnansi opini publik yang telah dipertahankan Lukashenko dalam waktu yang lama.

Makalah ini memberikan perspektif kritis tentang tantangan yang dihadapi Belarusia di bawah Lukashenko dan implikasinya bagi masa depannya di arena internasional, salah satunya adalah semakin buruknya relasi dengan Uni Eropa, dan semakin ketergantungan dengan Rusia (Astapenia & Matsukevich, 2022). Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa keputusan Lukashenko terkait penerimaan pengungsi dari Timur Tengah menuju Uni Eropa melewati Belarusia dan menimbulkan krisis merupakan hasil dari kurang harmonisnya hubungan antara kedua pihak ini.

Dari beberapa kajian di atas dapat disimpulkan bahwa krisis pengungsi di perbatasan Belarusia dengan Uni Eropa dinilai memiliki kompleksitas yang cukup rumit. Hal ini menjadi menarik sebab dapat dikaji dari banyak sudut pandang pula. Mulai dari geopolitik, kemanusiaan, hingga politisasi migran. Penulis menemukan bahwa belum ada pembahasan yang sistematis mengenai proses terbentuknya hubungan buruk antara Uni Eropa dengan Belarusia yang menggunakan analisis level individu. Untuk mengisi kekosongan tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan kajian atas implikasi kepribadian Aleksandr Lukashenko terhadap hubungan buruk Belarusia dengan Uni Eropa pada 2020-2022.

1.5.2. Pendekatan Idiosinkratik

Penelitian ini berfokus pada analisis level individu yang meyakini bahwa karakteristik pribadi seorang pemimpin memainkan peran penting juga dalam menentukan suatu kebijakan luar negeri (Allison, 1971). Seorang elit juga dapat menjadi variabel penting yang menavigasi suatu kebijakan luar negeri dan membuat pola interaksi dalam hubungan internasional menjadi dinamis. Individu sangat lekat dengan nilai dan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Karakteristik pribadi, yang unik dan khas ini disebut dengan idiosinkratik (Mingst & Arreguín-Toft, 2017).

Pendekatan ini memiliki perdebatan yang hangat di kalangan para ahli penganut ekstremis. Di satu sisi terdapat pandangan naif bahwa hasil politik hanyalah proyeksi dari kepribadian para pemimpin, dan di sisi lain adalah pandangan yang sama sederhananya bahwa kepribadian individu tidak memiliki

pengaruh terhadap pengambilan keputusan politik (Post, 2003). Oleh karena perdebatan para ekstremis tersebut, muncullah titik tengah dari kedua pandangan ini, seperti yang dikutip dari Greenstein (1969) ada kondisi tertentu dimana kepribadian pemimpin memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan. Kondisi khusus tersebut dibagi menjadi empat; ketika dihadapkan dengan situasi yang tidak stabil atau tidak jelas, ketika tidak ada tuntutan untuk bersikap sesuai peran, ketika berada di tempat yang strategis, dan ketika pemimpin berperilaku spontan.

Salah satu yang ahli dalam bidang ini adalah Margaret Hermann, seorang psikolog politik terkemuka Amerika. Hermann terkenal karena karyanya dalam psikologi politik, khususnya di bidang hubungan internasional dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Margaret Hermann mengembangkan teknik untuk menilai kepribadian pemimpin yakni *Personality Assessment-at-a Distance* (1983; dibahas dalam Preston 2001). Metode ini bekerja dengan menggunakan analisis konten untuk menganalisis transkrip dari respon dalam wawancara yang umumnya mengandalkan spontanitas. Dengan menggunakan data ini, tanpa harus benar-benar bertemu dengan pembuat kebijakan secara langsung, M. Hermann (1984, 1999) menetapkan sejumlah pengelompokan kepribadian yang relevan dengan pengambilan kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri (Hermann, Preston, Korany, & Shaw, Summer 2001).

Margaret Hermann secara garis besar mengkategorikan tipe pemimpin sesuai dengan kepribadian mereka menjadi dua, yakni tipe *goals-oriented* dan tipe

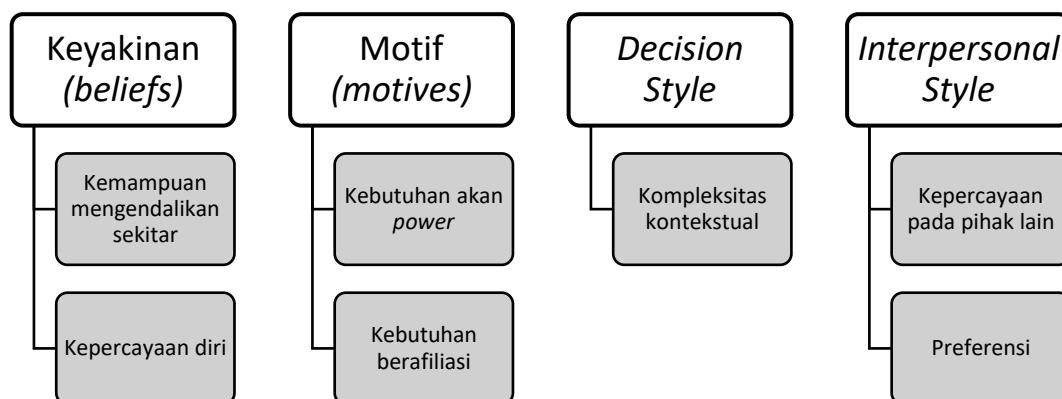
context-oriented (Hermann M. G., 2012) dalam bukunya yang lain, Hermann juga menyebut kedua tipe ini sebagai tipe pemimpin agresif dan pemimpin konsiliator (Hermann M. G., Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders, 1980). Dua kelompok ini merupakan hasil dari analisis mendalam menggunakan kerangka kerja yang disebut dengan *Leadership Traits Analysis (LTA)* terhadap tujuh ciri-ciri utama yang membangun sebuah gaya kepemimpinan. Ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) **Keyakinan dalam mengontrol** suatu peristiwa, berkisar pada tinggi rendahnya keyakinan terhadap kemampuan pemimpin dalam mempengaruhi peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Beyond domestic
- 2) **Kebutuhan akan kekuasaan**, kita dapat menilai kecenderungan pemimpin untuk membangun, mempertahankan dan memperluas kekuasaan dengan mempengaruhi dan mengendalikan orang lain.
- 3) **Kompleksitas konseptual**, yang meliputi pengujian terhadap keterbukaan pemimpin terhadap informasi di sekitarnya, termasuk kemampuan mengenali berbagai perspektif dan membedakan berbagai elemen dan individu di lingkungannya.
- 4) **Kepercayaan diri**, mengukur keyakinan pemimpin tentang kemampuan pribadi, termasuk ketegasan dalam bahasa yang merujuk ke dirinya sendiri.
- 5) **Berorientasi terhadap tugas vs. hubungan**. Pengukuran berfokus pada prioritas dalam pemecahan masalah dan pencapaian tujuan atau membangun hubungan yang harmonis dan menangani dinamika antar-pribadi.

- 6) **Ketidakpercayaan** terhadap pihak lain. Kecenderungan pemimpin untuk curiga atau skeptis terhadap motif orang lain.
- 7) **Bias** terhadap kelompok, menganalisis preferensi terhadap kelompok, ketegasan dalam penggunaan '**kami vs. mereka**', ini akan berpengaruh besar terhadap aliansi politik. Bias terhadap kelompok tertentu dapat terjadi berdasarkan banyak faktor, diantaranya adalah nilai-nilai yang melekat dalam suatu individu. Suku bangsa, identitas sosial, ideologi, merupakan beberapa contoh variabel yang mempengaruhi bias seorang pemimpin terhadap kelompok tertentu.

Gambar 1. 1 Framework Margaret Hermann dalam Menganalisis

Idiosinkratis Pemimpin



Sumber: Diolah dari Hermann, (2012)

Ketujuh karakteristik pemimpin di atas kemudian dikelompokkan lagi oleh Hermann (1980) kedalam empat kelompok besar. Yakni:

- 1) Keyakinan (*beliefs*), yang meliputi hal-hal yang sangat fundamental yang melekat pada individu tentang bagaimana mereka mendefinisikan dunia, cara mereka mendefinisikan peran mereka di panggung global, dan cara mereka menafsirkan peristiwa dan tekanan eksternal. Hermann menempatkan keyakinan terhadap kemampuan mengendalikan suatu peristiwa serta kepercayaan diri pemimpin kedalam kategori ini.
- 2) Motif (*motives*), diartikan sebagai hal-hal yang menjadi alasan seorang pemimpin berpartisipasi dalam politik melalui kebijakannya. Motif dapat berasal dari ambisi pribadi, kebutuhan psikologis, atau tujuan politik — seperti keinginan untuk berkuasa, pengakuan, atau warisan. Motif membantu menjelaskan mengapa tindakan tertentu diambil, bahkan ketika tindakan tersebut mungkin tampak kontraproduktif atau provokatif. Dalam hal ini adalah adanya kebutuhan akan kekuasaan, atau kebutuhan untuk berafiliasi dalam hubungan yang harmonis.
- 3) Gaya pengambilan keputusan (*decision style*), yaitu terkait bagaimana seorang pemimpin melakukan pendekatan untuk memecahkan suatu masalah dan juga dalam mengambil keputusan. Gaya dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh bagaimana seorang pemimpin melihat, menerima, dan membedakan suatu informasi, yakni berkaitan dengan kompleksitas konseptual. Beberapa pemimpin mengadopsi gaya yang tersentralisasi dan otoritatif, membuat keputusan yang cepat dan sepihak, sementara yang lain mengandalkan pendekatan konsultatif atau berdasarkan konsensus. Komponen ini sangat penting dalam memahami bagaimana

risiko dinilai, bagaimana saran dipertimbangkan, dan bagaimana tindakan tegas diimplementasikan.

- 4) Gaya interpersonal (*interpersonal style*), dimensi ini berfokus pada bagaimana pemimpin berinteraksi dengan orang lain, yang ditandai oleh tinggi rendahnya kepercayaan terhadap pihak lain, selain itu gaya interpersonal ini akan cenderung memiliki nilai yang tinggi ketika pemimpin berada di dalam kelompok yang masuk dalam preferensinya. Teman-temannya condong siapa-siapa saja. level politik beyond domestik, beyond nasional, negara, namun bercampur dengan analisis internasional. Dari sini bisa d

Melalui kerangka kerja tersebut kita dapat menentukan kepribadian pemimpin yang mempengaruhi arah kebijakan mereka. Dengan menganalisis isi pernyataan para pemimpin politik, kita dapat mulai mempelajari tentang citra yang mereka tampilkan di depan umum, bahkan ketika informasi spesifik mengenai karakter asli pemimpin tersebut tidak dapat diakses. Dalam proses analisis ini, watak asli pemimpin dapat ditemukan dengan mudah apabila mereka berada di dalam kondisi yang terdesak dan ketika melakukan aktivitas yang spontan. Ini merupakan salah satu kelebihan yang ditonjolkan oleh Hermann (2012) bahwa metode yang dibutuhkan oleh pendekatan ini lebih mudah dibandingkan metode yang dilakukan secara tradisional. Metode yang menggunakan kerangka kerja di atas memungkinkan evaluasi sifat-sifat pemimpin tanpa interaksi langsung, mengandalkan analisis isi pidato dan wawancara. Hal ini berbeda dengan metode tradisional yang sering kali memerlukan wawancara pribadi atau survei.

Melalui kerangka kerja Hermann, kita dapat menemukan sejumlah perbedaan persepsi pemimpin negara berdasarkan kepribadian dan karakter yang mereka miliki. Teori gaya kepemimpinan Margaret Hermann merupakan kerangka analisis mendalam yang menjelaskan bagaimana karakteristik personal seorang pemimpin secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dan diplomasi internasional. Melalui penelitiannya yang komprehensif, Hermann mengidentifikasi bahwa kepribadian individu tidak sekadar faktor tambahan, melainkan variabel kunci dalam memahami dinamika hubungan internasional. Gaya kepemimpinan Margaret Hermann membuka perspektif baru dalam analisis hubungan internasional. Dengan mengeksplorasi bagaimana karakteristik personal mempengaruhi diplomasi, teori ini menunjukkan bahwa pemimpin bukanlah sekadar eksekutor kebijakan, melainkan aktor kunci yang membentuk narasi global melalui cara pandang dan kepribadiannya. Herman membagi kedalam dua kelompok besar gaya kepemimpinan—agresif dan konsiliator—yang keduanya memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Tidak ada gaya yang mutlak superior, namun konteks dan tantangan spesifik akan menentukan efektivitas pendekatan seorang pemimpin dalam panggung internasional.

Tipe kepemimpinan agresif dan berorientasi independen memiliki kecenderungan ingin memiliki kekuasaan atas sesuatu dan juga berkeinginan untuk mengendalikan pihak lain (*high in need for power*). Tipe ini juga memiliki kompleksitas konseptual yang rendah (*low in conceptual complexity*), yang maknanya sulit untuk menerima informasi dari pihak lain. Selain itu, pemimpin yang agresif cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang rendah terhadap pihak

lain, selalu waspada dan meragukan segala sesuatu (*distrustful of others*). Juga merupakan yang mempercayai kemampuannya untuk mengendalikan sekitar dan cenderung memiliki tingkat percaya diri yang sangat tinggi (*high belief in own ability to control*). Perilaku pemimpin yang agresif biasanya menghasilkan kebijakan luar negeri yang independen, di mana mereka menjaga jarak dari negara lain dan mengharapkan interaksi terjadi sesuai dengan ketentuan mereka sendiri (Hermann M. G., *Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders*, 1980).

Sementara di lain sisi, tipe pemimpin konsiliator cenderung lebih terbuka untuk menjalin hubungan dengan pihak lain dibandingkan memiliki pemikiran untuk berkuasa atas pihak lain (*high need of affiliation*). Karena lebih membutuhkan afiliasi dengan pihak lain, tipe pemimpin ini cenderung memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pihak lain dan sebaliknya memiliki tingkat percaya diri yang sangat rendah (*trusting the others*). Tipe pemimpin yang konsiliatori biasanya memiliki kompleksitas kognitif yang tinggi, dimana mereka sangat peka terhadap isu-isu di sekitarnya dan cenderung sangat terbuka terhadap informasi (*high in conceptual complexity*) dan memiliki keyakinan yang rendah terhadap kemampuannya untuk mengendalikan suatu peristiwa (*low belief in own ability to control*). Dengan demikian, pemimpin yang bersifat mendamaikan bertujuan untuk memfasilitasi partisipasi dalam sistem internasional, seringkali mengeksplorasi berbagai solusi secara kolaboratif dengan negara lain (Hermann M. G., *Explaining Foreign Policy Behavior Using the Personal Characteristics of Political Leaders*, 1980).

Idiosinkratik didefinisikan sebagai sebuah pendekatan dalam kebijakan luar negeri menyoroti bagaimana perbedaan individu di antara para pemimpin—yang dibentuk oleh kepribadian, pengalaman, keyakinan, dan konteks situasional—dapat secara mendalam mempengaruhi hubungan internasional dan proses pengambilan keputusan. Individu sangat lekat dengan nilai dan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain (Mingst & Arreguín-Toft, 2017). Faktor idiosinkratik ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses pengambilan kebijakan yang melibatkan individu. Sebagai contoh, para pemimpin dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai suatu fenomena dalam hubungan internasional, dan kemudian dapat memberikan respon yang berbeda-beda pula. Hal ini disebabkan adanya perbedaan dalam karakter yang dimiliki setiap individu. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat sangat fundamental dan kita dapat melihat hasilnya dalam dunia politik internasional yang sangat dinamis dan berwarna.

Dengan demikian, persepsi pemimpin suatu negara terhadap masalah tidak hanya mencerminkan pandangan pribadi mereka tetapi juga dipengaruhi oleh konteks nilai-nilai yang fundamental yang lebih luas serta karakter unik masing-masing. Perbedaan ini dapat menghasilkan kebijakan yang bervariasi dalam respons terhadap tantangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, memahami latar belakang, kepribadian, dan pandangan pemimpin sangat penting untuk menganalisis arah kebijakan suatu negara. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman dalam kepemimpinan bukan hanya memperkaya diskusi tentang solusi tetapi juga menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan di tingkat global.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1) Perilaku Politik Individu

Perilaku politik mengacu pada tindakan, sikap, dan praktik individu atau kelompok dalam kaitannya dengan politik (Deth, 2014). Perilaku politik individu mencakup berbagai tindakan dan strategi yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan bagaimana individu membentuk opini politik, terlibat dalam kegiatan politik, dan mengamankan sumber daya dalam organisasi dan berinteraksi dengan sistem politik (Treadway, Hochwarter, Kacmar, & Ferris, 2005). Perilaku ini dibentuk oleh banyak variabel, dan faktor yang paling utama yang membentuk perilaku politik seseorang adalah faktor eksternal dan internal.

Terdapat beberapa kacamata yang dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku politik suatu individu, diantaranya, pilihan rasional yang menjelaskan partisipasi individu dalam politik merupakan hasil dari pertimbangan atas manfaat yang diterima oleh individu yang bersangkutan (Alford & Hibbing, 2004). Selanjutnya adalah identitas sosial yang menekankan peran identitas kelompok dalam membentuk perilaku politik (Hatemi & McDermott, 2011). Individu memperoleh sebagian identitas mereka dari kelompok sosial mereka (misalnya, etnis, agama, partai politik). Kemudian adalah pengaruh media yang mengkaji bagaimana media membentuk opini publik dan mempengaruhi perilaku politik. Media massa

memainkan peran penting dalam menginformasikan warga negara tentang isu politik dan kandidat, yang berdampak pada persepsi dan perilaku pemilih selama pemilihan umum. Pembingkai isu oleh media juga dapat mengubah persepsi publik secara signifikan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, kita dapat mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku politik individu yang berasal dari pihak eksternal.

Kemudian variabel yang berasal dari internal individu yang bersangkutan dapat dijelaskan melalui psikologi politik, genopolitik (biologis), serta sosiologis individu yang bersangkutan. Faktor sosiologis mengacu pada faktor-faktor seperti status sosial ekonomi, pendidikan, usia, jenis kelamin, dan etnis yang berdampak terhadap partisipasi dan sikap politik. Sementara genopolitik akan menjelaskan bagaimana pengaruh genetik, termasuk struktur dan fungsi otak yang mewariskan perilaku politik. Dan yang terakhir dan yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah faktor psikologis individu yang bersangkutan (Hatemi & McDermott, 2011).

Faktor psikologis secara signifikan mempengaruhi sikap politik melalui berbagai mekanisme, termasuk proses kognitif, respons emosional, ciri kepribadian, dan identitas sosial (Weinschenk, Dawes, Klemmensen, & Rasmussen, 2023). Proses kognitif mengambil peran untuk menyesuaikan pemikiran seseorang dalam menanggapi informasi baru yang mana dapat mempengaruhi sikap politik. Individu yang memiliki fleksibilitas kognitif

yang lebih tinggi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk terbuka dan mengubah pilihan politik mereka ketika mereka menerima informasi baru. Sebaliknya, orang dengan kognitif yang kaku cenderung menolak perubahan dan tidak mau menerima informasi baru yang berlawanan dengan keyakinannya. Respon emosional seperti takut, marah, dan emosi lainnya dapat mempengaruhi sikap politik secara signifikan. Misalnya, rasa takut dapat meningkatkan kepatuhan dan mendorong individu untuk mendukung kebijakan yang lebih otoriter (Bakker, 2023).

Demikian juga dengan kepribadian individu, orang-orang yang memiliki kepribadian ekstrovert cenderung lebih dapat berpartisipasi dalam kegiatan para aktivis politik. Selain itu contoh lain adalah individu yang memiliki keterbukaan cenderung condong ke ideologi liberal, dan individu yang memiliki ketelitian yang tajam cenderung lebih konservatif. Selain itu, faktor psikologis individu juga terbentuk dan berkembang dipengaruhi oleh identitas sosiologisnya. Identitas sosiologis ini diperoleh dari lingkungan dan kelompok dimana individu yang bersangkutan hidup. Identifikasi ini mempengaruhi sikap politik dengan mempromosikan loyalitas dalam kelompok dan bias terhadap kelompok luar, yang menyebabkan individu mengadopsi keyakinan dan perilaku kelompok mereka (Hatemi & McDermott, 2011).

Faktor psikologis dan sosial individu memainkan peran penting dalam mendorong perilaku politik individu. Memahami dimensi ini

memberikan pandangan komprehensif tentang bagaimana individu menavigasi dan memberikan pengaruh dalam lingkungan politik dan kelompok mereka. Individu yang berperilaku politik tidak hanya Masyarakat biasa saja, namun juga termasuk para elit politik seperti presiden yang memainkan peran penting dalam membentuk hubungan internasional.

2) Kebijakan Luar Negeri

Rosenau mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai perilaku adaptif yang ditunjukkan negara dalam menanggapi tekanan internal dan eksternal. Berdasarkan definisi ini dapat dimaknai bahwa kebijakan luar negeri sesungguhnya tidak statis; sebaliknya, kebijakan luar negeri bersifat dinamis dengan berevolusi berdasarkan interaksi yang kompleks antara orientasi, komitmen, aktivitas, dan berbagai faktor internal dan eksternal. (Rosenau, *Foreign Policy as Adaptive Behavior: Some Preliminary Notes for a Theoretical Model*, 1970). Kebijakan luar negeri dapat didefinisikan sebagai serangkaian tujuan, strategi, dan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara atau aktor non-negara dalam hubungannya dengan aktor lain dalam sistem internasional. Ini termasuk pengelolaan hubungan diplomatik, perjanjian perdagangan, aliansi keamanan, dan upaya bantuan kemanusiaan (Alden & Aran, 2017).

Menurut Rosenau, terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri (Rosenau, 1980), diantaranya adalah sebagai berikut.

- a) *Kepribadian pengambil keputusan*, nilai-nilai yang melekat dalam individu, pengalaman, sifat psikologis, atau yang lebih dipahami sebagai karakteristik individu yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap dunia internasional memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri inilah yang akan membentuk lanskap hubungan internasional.
- b) *Variabel sosial, seperti opini publik*, norma dan nilai-nilai social, budaya, turut mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri. Mengapa variabel ini memiliki peran yang penting disebabkan oleh keharusan yang dimiliki oleh para pemimpin untuk mempertahankan legitimasi dan dukungan publik terhadap kebijakan mereka.
- c) *Birokrasi pemerintah*, seperti struktur dan kelembagaan pemerintah memiliki peran dan mempengaruhi bagaimana kebijakan itu diformulasikan dan diimplementasikan. Politik birokrasi sering sekali menjadi elemen penentu dukungan terhadap suatu kebijakan.
- d) *Sistem internasional*, pengaruh eksternal seperti lanskap internasional, tren global, termasuk juga kebijakan luar negeri dari negara lain, tak kalah pentingnya dalam proses pengambilan kebijakan luar negeri. Rosenau menekankan bahwa negara harus

menyesuaikan kebijakan luar negara mereka dan menempatkan posisi mereka di dalam sistem internasional dengan tepat.

Kebijakan luar negeri merupakan pendekatan komprehensif suatu negara untuk terlibat dengan komunitas internasional, dengan menyeimbangkan kepentingan pragmatis dengan pertimbangan filosofis dan etika yang lebih luas. Dengan terus berkembang dan menanggapi perubahan lanskap global, negara-negara mengembangkan kebijakan luar negeri yang melindungi kepentingan inti mereka sekaligus berkontribusi pada stabilitas internasional dan saling pengertian (Mintz & Jr, 2010).

3) Krisis Pengungsi

Pengungsi menurut Konvensi 1951 didefinisikan sebagai orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut (UNHCR, 2024). Definisi pengungsi dibatasi secara hukum, dan sering kali melibatkan individu yang melintasi perbatasan internasional karena ketakutan yang beralasan akan penganiayaan. Kerangka hukum ini sangat penting dalam menentukan siapa saja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi dan perlindungan yang berhak mereka dapatkan di bawah hukum internasional.

Krisis pengungsi, secara umum, merujuk pada tantangan signifikan dan situasi yang berpotensi membahayakan yang timbul akibat masuknya sejumlah besar orang yang mengungsi secara paksa (UNHCR, 2024). Krisis pengungsi global merupakan masalah kemanusiaan yang signifikan, dengan lebih dari 100 juta orang yang mengungsi secara paksa di seluruh dunia. Krisis ini menuntut tanggapan kolektif dari komunitas internasional untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan para pengungsi. Prinsip-prinsip utama seperti non-refoulement, suaka, dan non-diskriminasi merupakan hal yang mendasar bagi perlindungan pengungsi.

Krisis pengungsi memiliki implikasi sosial-politik yang signifikan, terutama di Eropa, di mana krisis ini telah dikaitkan dengan krisis legitimasi. Masuknya pengungsi telah memicu perdebatan mengenai isu-isu sosial ekonomi, budaya, dan keamanan, yang sering kali mengarah pada narasi darurat dan kontrol perbatasan yang dimiliterisasi. Selain itu jika dilihat dari kacamata filosofi dan etika yang menimbulkan pertanyaan mengenai hak-hak pengungsi dan tanggung jawab negara penampung. Konsep suaka sebagai hak menantang kerangka kerja negara-bangsa tradisional, yang menekankan perlunya pendekatan transnasional terhadap hak asasi manusia.

Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah konsep krisis pengungsi mencakup interaksi yang kompleks antara faktor hukum, kemanusiaan, dan sosial politik. Hal ini menyoroti kebutuhan mendesak akan kerja sama internasional yang efektif dan kerangka kerja hukum untuk melindungi hak-

hak dan kesejahteraan para pengungsi. Mengatasi krisis pengungsi membutuhkan pendekatan holistik yang menyeimbangkan antara keprihatinan kemanusiaan dengan realitas hukum dan politik, menumbuhkan budaya solidaritas dan tanggung jawab bersama.

1.6.2. Definisi Operasional

1) Perilaku Politik Individu

Perilaku politik individu yang dimaksudkan di dalam penelitian ini mengacu pada tindakan, sikap, dan keputusan Presiden Lukashenko dalam kebijakan luar negeri Belarusia yang menyebabkan terjadinya krisis pengungsi di perbatasan Belarusia dengan Uni Eropa. Penelitian ini akan berfokus untuk menjelaskan karakteristik pribadi Presiden Lukashenko ketika menanggapi situasi politik antara Belarusia dengan Uni Eropa. Perilaku politik yang ditekankan dalam penelitian ini adalah sebagai bentuk manifestasi persepsi, pemahaman, partisipasi, dan sikap terhadap isu-isu politik dari Presiden Lukashenko dalam memandang hubungannya dengan Uni Eropa. Dan hal inilah yang akan diteliti sebab perilaku politik Lukashenko merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi proses pengambilan kebijakan terkait masalah yang terjadi.

2) Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri yang akan dibahas di penelitian ini adalah keputusan Lukashenko yang mempermudah, dan memfasilitasi para

pengungsi yang hendak mencari suaka ke Uni Eropa. Kebijakan ini dimaknai sebagai setiap respon, baik dalam kebijakan tertulis, maupun respon secara lisan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belarusia, dalam hal ini adalah Presiden Lukashenko terkait peristiwa atau isu-isu seputar krisis pengungsi di perbatasannya dengan Uni Eropa. Kebijakan luar negeri Belarusia juga tak lepas dari pengaruh variabel-variabel yang dibahas oleh Rosenau, salah satunya adalah kepribadian pengambil kebijakan, yakni dalam hal ini adalah Presiden Lukashenko.

3) Krisis Pengungsi

Krisis pengungsi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah bencana kemanusiaan karena ribuan migran, terutama dari Timur Tengah dan Afrika, diarahkan ke Belarus dengan janji untuk menyeberang ke Uni Eropa dan terjebak di perbatasan kedua wilayah ini. Krisis yang terjadi di perbatasan Belarus dan Uni Eropa, khususnya Polandia ini, telah menjadi isu yang semakin mendesak sejak tahun 2021. Para pengungsi yang terjebak di perbatasan sering kali hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Mereka terpaksa tinggal di tenda-tenda dan menghadapi cuaca dingin tanpa akses yang memadai ke makanan, air bersih, atau perawatan medis. Sehingga tidak mengherankan apabila pengungsi ini mengalami berbagai masalah kesehatan seperti hipotermia dan dehidrasi akibat kondisi cuaca dingin yang ekstrem.

1.7. Argumen Penelitian

Argumen dalam penelitian ini meyakini bahwa faktor idiosinkratik Presiden Lukashenko merupakan salah satu alasan yang berperan besar dalam pengambilan kebijakan terkait pengungsi yang menghasilkan krisis di perbatasan antara Belarusia dengan Uni Eropa yang dimulai sejak 2021. Alasan diberlakukannya kebijakan untuk memfasilitasi dan membantu pengungsi untuk melakukan penyeberangan dari Belarusia menuju Uni Eropa tidak lepas dari idiosinkratik Lukashenko yang merupakan tipe pemimpin agresif. Tipe pemimpin ini lebih senang bertindak mandiri dan berorientasi pada tugas dibandingkan membangun hubungan yang harmonis melalui cara-cara yang diplomatis. Mereka cenderung lebih tegas dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan yakin dengan kemampuannya untuk mengontrol peristiwa dan pihak lain.

1.8. Metodologi Penelitian

1.8.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian eksplanatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif eksplanatif merupakan metode yang mengidentifikasi kausalitas dari suatu permasalahan (Rosyidin, 2019). Argumen penelitian tentu harus berangkat dari kerangka teori yang sesuai sehingga didapatkan penjelasan terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif eksplanatif yakni untuk menjelaskan fenomena serta faktor

yang menyebabkan Presiden Aleksandr Lukashenko mengambil kebijakan yang membuat hubungan Belarusia dengan Uni Eropa semakin memburuk.

1.8.2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian penulis adalah Presiden Belarusia, Aleksandr Lukashenko selama proses memburuknya hubungan politik antara Belarusia dengan Uni Eropa sepanjang tahun 2020-2022.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang akan digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teknik *desk research*. Teknik pengumpulan data ini digunakan penulis sebab kurangnya aksesibilitas dan mobilitas yang dimiliki penulis untuk melakukan observasi langsung, maupun wawancara langsung ke subjek penelitian, yakni Presiden Aleksandr Lukashenko. Sehingga data akan dikumpulkan melalui sumber yang relevan dan terverifikasi seperti jurnal, penelitian terdahulu, berita, dan sumber-sumber yang relevan yang bisa ditemukan di perpustakaan.

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pidato atau pernyataan langsung dari presiden (lisan) maupun pernyataan resmi di website kepresidenan (tulisan). Lalu data sekunder diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian terdahulu, berita, dan sumber-sumber yang relevan yang bisa ditemukan di perpustakaan.

1.8.4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis konten (content analysis). Holsti (1969) mengartikan analisis ini sebagai sebuah teknik untuk menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik khusus dari suatu pesan secara sistematis dan objektif. Analisis konten dikatakan tepat bagi penelitian ini dikarenakan telah terbukti dapat membantu mengukur karakteristik pribadi banyak pemimpin politik, terutama bagi penelitian yang melibatkan pimpinan negara yang tidak dapat dicapai dengan wawancara secara langsung (Hermann, 1980). Ini dilakukan dengan melakukan pengorganisasian dan pemilahan data berdasarkan teks yang berasal dari berbagai sumber seperti artikel, majalah, portal berita, konferensi pers, dan lain sebagainya. Penulis nantinya akan menghubungkan data yang diperoleh dengan kerangka teori yang dipakai untuk memberikan kesimpulan atas rumusan masalah.

1.9. Sistematika Penelitian

Penelitian ini akan terbagi kedalam empat bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang berisikan uraian latar belakang masalah yang diteliti. Pada bagian ini juga menyertakan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menganalisa penelitian, operasionalisasi konsep, serta metodologi penelitian.

Bab 2 merupakan bagian yang membahas mengenai latar belakang Aleksandr Lukashenko, termasuk masa muda dan karir politiknya. Dalam bab ini,

peneliti akan turut memaparkan secara sekilas sejarah hubungan antara Belarusia dengan Uni Eropa, serta menyajikan data yang mendukung terkait pengungsi serta krisis pengungsi yang terjadi di perbatasan antara Belarusia dengan Uni Eropa.

Bab 3 akan secara khusus membahas mengenai analisis kepribadian Lukashenko dan kaitannya dengan pembuatan kebijakan untuk menerima, memfasilitasi para pengungsi yang ingin mencari suaka ke Uni Eropa untuk masuk melalui Belarusia. Serta membahas krisis yang terjadi akibat kebijakan tersebut. Fokus utama bab ini adalah analisis karakter melalui penafsiran atau interpretasi dari pernyataan-pernyataan Lukashenko, yang akan membuktikan karakter Lukashenko sesuai dengan indikator kepribadian yang diekspektasikan yakni pemimpin yang agresif. Dari hasil analisis tersebut akan dilihat kecocokan antara faktor idiosinkratik Lukashenko terhadap kebijakannya terkait pengungsi dan krisis yang terjadi akibatnya dan lebih lanjut mengelaborasi karakteristik personal Lukashenko melalui penggunaan pendekatan konseptual yang ditawarkan oleh Margaret Hermann.

Bab 4 merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran – saran bagi penelitian lebih lanjut. Bab ini secara khusus akan mengungkap kesesuaian argumen awal peneliti dengan temuan penelitian. Bab ini juga akan memberikan evaluasi atas kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini dan memberikan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.